

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU EKONOMI UBI KAYU DI PROVINSI LAMPUNG

(The Impacts of Government's Policies on Cassava Economic Stockholders Welfare In Lampung Province)

Septaria Indah Sari, R. Hanung Ismono, Indah Nurmayasari

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145. E-mail: septariaindah@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the impacts of interest rates and urea fertilizer price policies on the welfare of cassava economic stakeholders in Lampung Province. This study uses the secondary data 1990-2010 analyzed by using two stages least squares (2SLS) model, and simulated based on changes in policies. The welfare of cassava economic stakeholders is based on the net surplus between producer surplus and consumer surplus. The simulation showed that the 10 % increase in interest rate caused the decrease in net surplus of 36.25 percent. The 10 % decrease in interest rate increased the net surplus by 10.18 percent. The 15 % rise in urea fertilizer price caused the decrease in net surplus by 7.69 percent. Moreover, the combination of 15 % increase in urea fertilizer price and 10 % decrease in interest rate caused the increase in net surplus by 325.17 percent.

Keywords: Cassava Demand, Cassava Economic Stakeholders, Cassava Supply, Welfare

PENDAHULUAN

Ubi kayu merupakan salah satu komoditas pangan yang strategis dilihat dari peranannya sebagai penghasil karbohidrat setelah beras. Prospek untuk tanaman ubi kayu ke depan di Indonesia sangat baik karena tanaman ubi kayu atau singkong merupakan bahan makanan potensial masa depan dalam tatanan pengembangan agribisnis dan agroindustri. Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi ubi kayu terbesar di Indonesia, diikuti pulau Jawa. Hal ini didukung oleh keadaan iklim dan lahan yang cukup strategis untuk penanaman ubi kayu. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas ubi kayu Provinsi Lampung tahun 2006-2010 cenderung meningkat. Luas panen, produksi dan produktivitas ubi kayu Provinsi Lampung tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi, luas panen, dan produktivitas ubi kayu di Provinsi Lampung 2006-2010

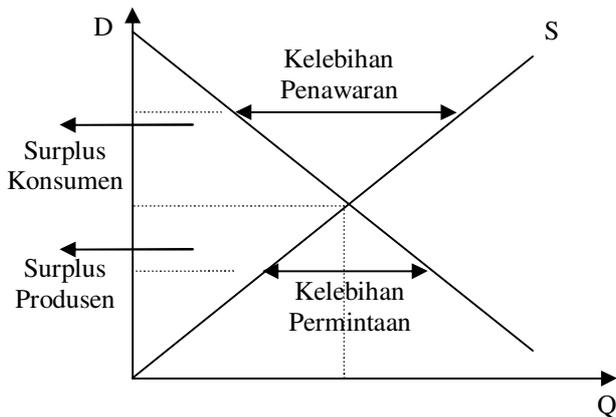
Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2006	283.430	5.499.403	19,4
2007	316.806	6.394.906	20,18
2008	318.969	7.721.882	24,20
2009	309.047	7.569.178	24,49
2010	346.217	8.637.594	24,94
Rerata	314.893	716.4592,6	22.642

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Peningkatan produksi dan produktivitas ubi kayu akan mendorong peningkatan penawaran ubi kayu di Provinsi Lampung. Akibatnya, penawaran ubi kayu yang meningkat menyebabkan harga ubi kayu turun. Semakin tinggi harga ubi kayu, maka semakin sedikit jumlah yang diminta dan sebaliknya semakin rendah harga ubi kayu maka semakin banyak jumlah yang diminta. Kekuatan permintaan dan penawaran ini mempengaruhi suatu harga ubi kayu tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puteri (2009) menunjukkan bahwa ubi kayu memiliki trend yang meningkat dalam hal produksi, konsumsi dan harga merupakan faktor pembentuk permintaan dan penawaran. Namun peningkatan harga yang terjadi tidak direspon secara baik oleh petani untuk meningkatkan produksinya. Hal ini terlihat dari trend luas areal panen yang menurun dan trend produktivitas yang meningkat secara perlahan, tidak beriringan dengan peningkatan harga ubi kayu yang cukup tajam. Hasil estimasi respon penawaran ubi kayu menunjukkan bahwa nilai respon elastistas penawaran ubi kayu adalah 0,08634 dalam jangka pendek dan 0,052794 dalam jangka panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga ubi kayu bersifat inelastis terhadap penawarannya (produksi) dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan hasil perhitungan proyeksi penawaran ubi kayu pada tahun 2025 adalah sebesar 9.896.217,338 ton.

Salah satu indikator kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu adalah adanya surplus produsen dan surplus konsumen yang meningkat. Surplus produsen adalah area di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga pada pasar bersaing sempurna, sedangkan surplus konsumen adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga (Lipsey *at al*,1995). Konsep surplus produsen dan konsumen dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kurva surplus produsen dan surplus konsumen

Penentuan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan petani ubi kayu di Provinsi Lampung. Kebijakan yang dianggap penting dalam peningkatan kesejahteraan petani adalah kebijakan peningkatan modal dan subsidi sarana produksi (pupuk). Modal dan sarana produksi merupakan faktor yang dapat menentukan produksi ubi kayu di Provinsi Lampung sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan petani ubi kayu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan pemerintah yaitu tingkat suku bunga dan harga pupuk urea terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu di Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan adalah data *time series* yaitu data tahun 1990-2010. Data diperoleh dari sumber dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Pertanian Provinsi Lampung, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah penentuan model persamaan permintaan dan penawaran. Berdasarkan order persamaan model dalam penelitian ini adalah *over identified* sehingga

dalam pengolahan data digunakan dengan metode 2SLS (*Two Stages Least Squares*). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model permintaan dan penawaran ubi kayu di Provinsi Lampung yang kemudian disimulasikan. Spesifikasi model yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

Areal panen ubi kayu

$$AUBL = a_0 + a_1HUBFL + a_2HJL + a_3HREAL + a_4T + a_5R + a_6CHL + a_7LAUBL + u_1.....(1)$$

Produktivitas ubi kayu

$$YUBL = b_0 + b_1HUBFL + b_2AUBL + b_3R + b_4LYUBL + u_2(2)$$

Permintaan ubi kayu untuk konsumsi

$$DKL = c_0 + c_1HUBL + c_2IPL + c_3TPL + c_4LDKL + u_3(3)$$

Permintaan untuk industri tapioca

$$DITL = d_0 + d_1HUBL + d_2HJL + d_3HUTL + d_4R + d_5TPL + d_6LDITL + u_4.....(4)$$

Harga ubi kayu tingkat pedagang besar

$$HUBL = e_0 + e_1SUBL + e_2DUBL + e_3HUBIN + e_4R + e_5HREAL + e_6LHUBL + u ... (5)$$

Harga ubi kayu tingkat petani

$$HUBFL = f_0 + f_1HUBL + f_2HREAL + f_3R + f_5LHUBFL + u_6 (6)$$

Keterangan:

- AUBL = Luas Panen ubi kayu
- CHL = Curah hujan Lampung
- HBUFL = Harga ubi kayu tingkat petani lampung
- HJL = Harga jagung Lampung
- HREAL = Harga pupuk urea
- T = Trend teknologi
- R = Tingkat suku bunga
- YUBL = Produktivitas ubi kayu
- QUBL = Produksi ubi kayu
- DKL = Permintaan ubi kayu untuk konsumsi
- HBRL = Harga beras Lampung
- IPL = Pendapatan
- TPL = Jumlah penduduk Lampung
- DITL = Permintaan ubi kayu industri tapioka
- HUTL = Harga tepung tapioka
- DUBL = Permintaan ubi kayu Lampung

- SUBL = Penawaran ubi kayu Lampung
- PAD = Perdagangan antar daerah
- HUBL = Harga ubi kayu Lampung (tingkat pedagang besar)
- HUBIN = Harga ubi kayu Indonesia
- LAUBL = Luas panen ubi kayu t-1
- LYUBL = Produktivitas ubi kayu t-1
- LDKL = Permintaan ubi kayu untuk konsumsi langsung t-1
- LDITL = Permintaan ubi kayu untuk industri tapioka t-1
- LHUBL = Harga ubi kayu Lampung (tingkat pedagang besar) t-1
- LHBUFL = Harga ubi kayu tingkat petani Lampung t-1

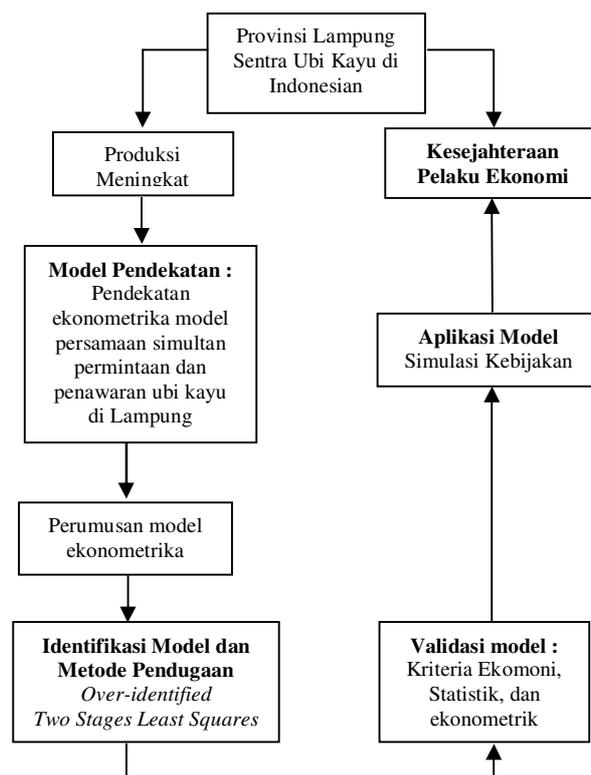
Data diolah dengan menggunakan program komputer SAS dengan prosedur SIMLIN. Untuk mengetahui seberapa valid model yang digunakan dalam simulasi kebijakan dilakukan validasi model dengan menggunakan statistik *Root Mean Square Percent Error* (RMSPE) dan statistik *U-Theil* (Sinaga dan Sitepu, 2006).

$$RMSPE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{Y_t^s - Y_t^a}{Y_t^a} \right)^2} \dots\dots\dots (7)$$

$$U = \frac{\sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (Y_t^s - Y_t^a)^2}}{\sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (Y_t^s)^2} - \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (Y_t^a)^2}} \dots\dots\dots (8)$$

- dimana :
- Y_t^s : Nilai simulasi dasar
 - Y_t^a : Nilai aktual
 - T : Jumlah waktu simulasi
 - RMSPE : *Root Mean Square Percent Error*
 - U : Koefisien ketidaksamaan Theil

Skenario dalam simulasi penelitian ini adalah menganalisis dampak harga pupuk urea dan tingkat suku bunga kredit terhadap tingkat kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu. Kriteria kesejahteraan pelaku ekonomi dilihat dari meningkat atau menurunnya surplus produsen dan konsumen. Adapun kerangka pemikiran simulasi kebijakan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Simulasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Ubi Kayu di Provinsi Lampung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validasi Model

Untuk validasi model menggunakan statistik *Root Mean Square Percent Error* (RMSPE) dan statistik *U-Theil*. Validasi model bertujuan untuk melihat apakah model cukup digunakan untuk simulasi alternatif kebijakan. Hasil validasi model dapat dilihat pada Tabel 2.

Nilai RSMPE enam persamaan yang memiliki nilai RSMPE di bawah 50 persen, artinya bahwa penyimpangan nilai peubah endogen hasil penggunaan penyimpangan dari nilai aktualnya sebesar kurang dari 50 persen. Semakin kecil nilai RSMPE, maka persamaan tersebut memiliki nilai prediksi yang makin baik untuk dilakukan simulasi. Berdasarkan nilai RSMPE ini, dari sembilan persamaan delapan persamaan yang memiliki nilai prediksi yang cukup baik yaitu persamaan areal panen ubi kayu, produktivitas ubi kayu, produksi ubi kayu, permintaan konsumsi langsung, harga ubi kayu tingkat pedagang besar, permintaan ubi kayu untuk industri tapioka, permintaan ubi kayu Lampung, dan harga ubi kayu tingkat petani, sedangkan persamaan penawaran ubi kayu memiliki nilai prediksi yang kurang baik karena memiliki nilai RSMPE di atas 50 persen.

Tabel 2. Hasil validasi model permintaan dan penawaran ubi kayu di Provinsi Lampung

No	Peubah	RSMPE	U
1.	Areal panen ubi kayu AUBL	7,85	0,03
2.	Produktivitas ubi kayu YUBL	12,12	0,04
3.	Produksi ubi kayu QUBL	45,87	0,32
4.	Permintaan ubi kayu konsumsi langsung DKL	15,64	0,04
5.	Permintaan industri tapioka DITL	32,22	0,24
6.	Permintaan ubi kayu DUBL	21,52	0,22
7.	Penawaran ubi kayu DITL	50,93	0,34
8.	Harga ubi kayu tingkat pedagang besar HUBL	32,15	0,11
9.	Harga ubi kayu tingkat petani HUBFL	44,13	0,14

Statistik U digunakan untuk mengukur besarnya penyimpangan dan pendugaan model. Semakin kecil nilai U, maka pendugaan model semakin baik. Nilai $U = 0$ artinya pendugaan model sempurna. Berdasarkan nilai U-Theil, semua persamaan memiliki nilai di bawah 0,5 dan mendekati 0. Hal ini berarti semua persamaan memiliki nilai prediksi yang cukup baik untuk dilakukan simulasi kebijakan.

Analisis surplus produsen dan surplus konsumen dapat digunakan untuk melihat dampak alternatif kebijakan yang disimulasikan terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu di Provinsi Lampung. Dalam simulasi ini dilihat bagaimanakah perubahan distribusi kesejahteraan pelaku ekonomi sebagai akibat dari diterapkannya kebijakan yang disimulasikan. Hasil simulasi kebijakan terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Dampak kebijakan terhadap kesejahteraan para pelaku ekonomi ubi kayu di Provinsi Lampung (persen)

No	Kebijakan	Surplus Produsen	Surplus Konsumen	Net Surplus
1.	Kenaikan tingkat suku bunga sebesar 10 %	-27,36	-8,89	-36,25
2.	Penurunan suku bunga sebesar 10 %	1,28	8,90	10,18

No	Kebijakan	Surplus Produsen	Surplus Konsumen	Net Surplus
3.	Kenaikan harga pupuk urea sebesar 15 %	-7,46	-0,23	-7,69
4.	Kenaikan harga pupuk urea sebesar 15 % dan penurunan tingkat suku bunga 10 %	1,90	322,27	325,17

Dampak Kebijakan Kenaikan dan Penurunan Tingkat Suku Bunga terhadap Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Ubi Kayu di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tingkat suku bunga sebesar 10% berdampak pada penurunan produksi ubi kayu di Provinsi Lampung sebesar 33,70 persen. Hal tersebut karena petani tidak bisa menambah areal penen ubi kayu karena modal yang dimiliki petani menurun akibat dari kenaikan tingkat suku bunga. Kondisi ini juga berdampak pada penurunan produksi ubi kayu di Provinsi Lampung. Penurunan produksi direspon dengan penurunan penawaran ubi kayu di Provinsi Lampung sehingga mengakibatkan harga ubi kayu naik. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 yang disajikan pada halaman lampiran.

Kenaikan tingkat suku bunga juga berdampak pada kesejahteraan produsen dan konsumen. Kesejahteraan produsen dan konsumen ubi kayu dapat dilihat dari tingkat surplus produsen dan surplus konsumen. Kenaikan tingkat suku bunga berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan produsen dan konsumen ubi kayu. Penurunan kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu ditunjukkan pada penurunan surplus produsen dan konsumen sebesar 27,36 persen dan 8,89 persen. Hal ini disebabkan kenaikan tingkat suku bunga sebesar 10% direspon dengan berkurangnya areal panen, produksi di tingkat produsen, penurunan permintaan ubi kayu dan kenaikan harga ubi kayu. Dengan demikian jika pemerintah menetapkan kebijakan meningkatkan tingkat suku bunga maka kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu di Provinsi Lampung akan menurun. Peningkatan tingkat suku bunga akan berdampak pada modal yang dimiliki oleh petani. Modal yang dimiliki petani akan berkurang, terutama modal yang diperoleh dari meminjam uang di bank.

Tabel 4. Dampak kenaikan tingkat suku bunga kredit sebesar 10 persen terhadap nilai rata-rata peubah endogen

No	Variabel	Simulasi Dasar	Simulasi Kebijakan	Unit perubahan	
				Unit	%
1.	Areal panen ubi kayu	290,21	282,14	-8,06	-2,70
2.	Produktivitas ubi kayu	23,41	22,80	-0,60	-2,50
3.	Produksii ubi kayu	507,19	336,19	-171	-33,70
4.	Permintaan ubi kayu konsumsi langsung	345,80	345,9	0,1	0,02
5.	Permintaan industri tapioka	793,42	792,61	-0,81	-0,10
6.	Permintaan ubi kayu	793,73	792,92	-0,81	-0,10
7.	Penawaran ubi kayu	386,39	386,39	0,000	0,00
8.	Harga ubi kayu tingkat pedagang besar	678,25	700,12	21,87	3,20
9.	Harga ubi kayu tingkat petani	127,07	127,39	0,32	0,25

Peningkatan suku bunga kredit akan membuat petani kesulitan mengembalikan modal yang dipinjam dari bank. Oleh karena itu, petani harus lebih ekstra dalam menggunakan modal yang dimiliki akibatnya pendapatan yang diperoleh petani pun ikut berkurang. Kebijakan peningkatan tingkat suku bunga tidak hanya berdampak pada kesejahteraan produsen akan tetapi juga berdampak pada konsumen. Dengan adanya peningkatan tingkat suku bunga maka konsumen harus membayar lebih yaitu sebesar 3,20 persen untuk membeli ubi kayu karena ada peningkatan harga ubi kayu akibat kenaikan tingkat suku bunga.

Hasil simulasi kebijakan penurunan tingkat suku bunga 10 % menyebabkan peningkatan areal panen ubi kayu yang direspon dengan peningkatan produksi ubi kayu sebesar 12,62 persen di Provinsi Lampung. Adanya peningkatan produksi ubi kayu akan meningkatkan penawaran ubi kayu sehingga akan mengakibatkan penurunan harga ubi kayu sebesar 0,03 persen. Penurunan harga ubi kayu akan direspon dengan peningkatan permintaan akan ubi kayu. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Dampak penurunan tingkat suku bunga terhadap tingkat kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu terlihat pada perubahan surplus produsen dan konsumen ubi kayu. Penurunan tingkat suku bunga berdampak positif terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan surplus produsen dan konsumen masing-masing sebesar 1,28 persen dan 8,90 persen. Peningkatan surplus produsen terjadi karena adanya peningkatan areal panen ubi kayu sehingga produksi ubi kayu meningkat. Adanya peningkatan produksi ubi kayu maka pendapatan yang diperoleh petani akan meningkat dengan asumsi harga ubi kayu tetap. Selain itu dengan adanya kebijakan penurunan tingkat suku bunga akan mempermudah petani dalam mendapatkan modal untuk melakukan usahatani ubi kayu.

Penurunan tingkat suku bunga juga akan membuat para investor lebih suka menginvestasikan uangnya pada bidang usahatani, misalnya dengan menginvestasikan untuk membeli tanah pertanian sehingga lahan pertanian akan bertambah. Asumsinya lahan pertanian yang dibeli digunakan untuk berusaha tani ubi kayu sehingga produksi akan bertambah.

Keuntungan yang diperoleh konsumen dengan adanya penurunan tingkat suku bunga yaitu harga ubi kayu turun, sehingga konsumen tidak perlu membayar lebih untuk membeli ubi kayu. Hal ini mengakibatkan permintaan akan ubi kayu meningkat. Asumsinya dengan adanya penurunan tingkat suku bunga akan cenderung membuat konsumen lebih suka membelanjakan uang dibandingkan dengan menabung di bank.

Dampak Kebijakan Kenaikan Harga Pupuk Urea terhadap Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Ubi Kayu di Provinsi Lampung

Simulasi kenaikan harga pupuk urea sebesar 15% mengakibatkan penurunan areal panen ubi kayu sebesar 0,02 persen sehingga produksi ubi kayu menurun. Penurunan produksi ubi kayu menyebabkan penawaran menurun sehingga harga ubi kayu naik. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 6. Kenaikan harga pupuk urea menyebabkan surplus produsen turun sebesar 7,465 persen yang disebabkan naiknya harga input (pupuk) dalam usahatani ubi kayu sehingga mengakibatkan pendapatan petani berkurang. Kenaikan harga pupuk urea juga menyebabkan penurunan surplus konsumen, walaupun penurunan kecil. Penurunan tersebut sebesar 0,230 persen yang disebabkan produsen menaikkan harga ubi kayu sehingga konsumen harus membayar harga yang lebih. Adanya kebijakan menaikkan harga pupuk urea 15% secara keseluruhan para pelaku ekonomi ubi kayu mengalami penurunan kesejahteraan sebesar 7,69 persen.

Tabel 5. Dampak penurunan tingkat suku bunga kredit sebesar 10 persen terhadap nilai rata-rata peubah endogen

No	Variabel	Simulasi Dasar	Simulasi Kebijakan	Unit Perubahan	
				Unit	%
1.	Areal panen ubi kayu	290,216	370,05	79,83	27,50
2.	Produktivitas ubi kayu	23,41	29,45	6,04	25,80
3.	Produkdi ubi kayu	507,19	571,20	64,01	12,62
4.	Permintaan ubi kayu konsumsi langsung	345,8	345,5	0,30	0,080
5.	Permintaan industri tapioka	793,427	801,52	8,09	1,02
6.	Permintaan ubi kayu	793,734	801,83	8,09	1,02
7.	Penawaran ubi kayu	386,399	386,39	0,00	0,00
8.	Harga ubi kayu tingkat pedagang besar	678,25	676,05	-2,20	-0,32
9.	Harga ubi kayu tingkat petani	127,07	127,03	-0,04	-0,03

Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2012), yang menyimpulkan bahwa kebijakan menaikkan harga eceran pupuk sebesar 10% dan 15 % merugikan konsumen tetapi menguntungkan produsen petani padi. Pada penelitian ini dihasilkan bahwa peningkatan harga pupuk 15 % merugikan produsen dan konsumen ubi kayu. Perbedaan tersebut terjadi karena pada umumnya petani padi dilindungi oleh pemerintah terkait dengan kebijakan harga padi yaitu harga pokok pembelian (HPP). Oleh karena itu, walaupun dilakukan peningkatan harga pupuk yang mengakibatkan petani harus menambah modalnya untuk membeli pupuk, petani tidak akan begitu dirugikan karena harga pembelian gabah kering naik yang menyebabkan surplus produsen naik. Berbeda halnya dengan petani (produsen) ubi kayu tidak ada perlindungan harga ubi kayu, ketika harga pupuk naik maka modal yang digunakan petani bertambah sehingga pendapatan petani berkurang.

Pada hakekatnya tujuan penetapan kebijakan pemerintah khususnya bidang pertanian yaitu meningkatkan kesejahteraan petani. Akan tetapi, adanya kebijakan peningkatan harga pupuk urea mengakibatkan penurunan kesejahteraan petani ubi kayu. Hal ini karena menambah permasalahan petani dalam memperoleh persediaan sarana produksi terutama pupuk. Tingginya harga pupuk akan menambah modal yang akan dikeluarkan oleh petani sehingga pendapatan yang diperoleh petani berkurang. Permasalahan bidang pertanian yang masih sering terjadi di Indonesia adalah masalah petani dalam mendapatkan modal, input pertanian, lahan dan permasalahan petani dalam memasarkan produknya. Jika pemerintah menetapkan adanya kebijakan kenaikan harga pupuk urea akan menambah permasalahan petani dalam memperoleh sarana produksi dan mengurangi tingkat kesejahteraan petani ubi kayu.

Dampak kenaikan harga pupuk urea terhadap konsumen adalah adanya penambahan uang yang harus dibayar oleh konsumen akibat kenaikan harga ubi kayu. Kenaikan harga ubi kayu tersebut akibat dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani bertambah, maka untuk menutupi biaya produksi petani menaikkan harga ubi kayu. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan alternatif kebijakan lain misalnya dengan mengkombinasikan kebijakan kenaikan harga pupuk dengan penurunan tingkat suku bunga.

Dampak Kombinasi Kebijakan Kenaikan Harga Pupuk Urea dan Penurunan Tingkat Suku Bunga terhadap Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Ubi Kayu di Provinsi Lampung

Selain simulasi terhadap kebijakan kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga serta kenaikan harga pupuk urea dilakukan juga simulasi kombinasi kebijakan kenaikan harga pupuk urea dan penurunan tingkat suku bunga. Hasil kombinasi simulasi kenaikan harga pupuk urea sebesar 15% dan penurunan tingkat suku bunga sebesar 10 % meningkatkan luas areal panen ubi kayu sehingga produksi ubi kayu juga meningkat. Akibat peningkatan produksi terjadi penurunan harga ubi kayu. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.

Kombinasi kebijakan kenaikan harga pupuk urea dan penurunan tingkat suku bunga menyebabkan net surplus yang positif sebesar 325,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penurunan tingkat suku bunga 10% mampu menutupi kerugian akibat kenaikan harga pupuk sebesar 15%. Kebijakan kenaikan harga pupuk menyebabkan produsen harus menambah biaya produksi sehingga akan menaikkan harga ubi kayu dan berdampak pada permintaan ubi kayu yang akan menurun. Oleh sebab itu, dilakukan kombinasi kebijakan kenaikan harga pupuk urea dengan penurunan tingkat suku bunga.

Tabel 6. Dampak kenaikan harga pupuk urea sebesar 15 persen terhadap nilai rata-rata peubah endogen

No	Variabel	Simulasi Dasar	Simulasi Kebijakan	Unit Perubahan	
				Unit	%
1.	Areal panen ubi kayu	290,216	290,12	-0,08	-0,02
2.	Produktivitas ubi kayu	23,412	23,15	-0,25	-1,06
3.	Produkdi ubi kayu	507,19	498,03	9,16	1,80
4.	Permintaan ubi kayu konsumsi langsung	345,8	344,10	-1,70	-0,49
5.	Permintaan industri tapioka	793,427	793,26	-0,46	-0,05
6.	Permintaan ubi kayu	793,734	793,57	-0,16	-0,02
7.	Penawaran ubi kayu	386,399	386,39	0,00	0,00
8.	Harga ubi kayu tingkat pedagang besar	678,25	681,10	2,85	0,42
9.	Harga ubi kayu tingkat petani	127,07	128,70	1,63	1,28

Kebijakan penurunan tingkat suku bunga diharapkan mampu menutupi kelemahan kebijakan kenaikan harga pupuk. Adanya penurunan tingkat suku bunga maka akan cenderung meningkatkan sifat konsumtif konsumen. Konsumen akan lebih cenderung suka membelanjakan uangnya dibandingkan menabungnya di bank karena tingkat suku bunga yang rendah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan surplus produsen dan konsumen, maka kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah kombinasi kenaikan harga pupuk dan penurunan tingkat suku bunga.

Tabel 7. Dampak kenaikan harga pupuk sebesar 15 persen dan penurunan tingkat suku bunga sebesar 10 persen terhadap nilai rata-rata peubah endogen

Variabel	Simulasi Dasar	Simulasi Kebijakan	Unit Perubahan	
			Unit	%
Areal panen ubi kayu	290,22	370,59	80,38	27,69
Produktivitas ubi kayu	23,412	29,56	6,14	26,26
Produkdi ubi kayu	507,19	583,20	76,01	14,98
Permintaan ubi kayu konsumsi langsung	345,80	347,70	0,10	0,02
Permintaan industri tapioka	793,43	801,36	7,93	1,001
Permintaan ubi kayu	793,73	801,67	8,27	1,04
Penawaran ubi kayu	386,40	386,39	0,00	0,00
Harga ubi kayu tingkat pedagang besar	678,25	676,05	-2,20	-0,32
Harga ubi kayu petani	127,07	127,02	-0,05	-0,03

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan dampak kebijakan pemerintah menaikkan tingkat suku bunga 10% terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu di Provinsi Lampung menyebabkan net surplus turun sebesar 36,25%. Kebijakan pemerintah dalam menurunkan tingkat suku bunga sebesar 10% menyebabkan net surplus naik sebesar 10,18%. Kebijakan pemerintah menaikkan harga pupuk urea menyebabkan penurunan net surplus sebesar 7,69%. Kombinasi kebijakan menaikkan harga pupuk urea dan penurunan tingkat suku bunga menyebabkan net surplus naik sebesar 325,17%.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Lampung. 2010. Lampung Dalam Angka. Lampung

Gujarati, D.N. 1988. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Erlangga: Jakarta.

Puteri, G.A. 2009. Analisis Respon dan Proyeksi Penawaran Ubi Kayu di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor: Bogor

Lipsey, R, *et al.* 1995. Pengantar Ekonomi. Bina Rupa Aksara. Jakarta

Sembiring, S.A. 2012. Dampak Kebijakan Pemerintah Melalui Instruksi Pemerintah Tahun 2005-2008 Tentang Kebijakan Perberasan Terhadap Ketahanan Pangan. *Forum Pascasarjana*. Vol. 35. No 1 Januari 2012.

Sitepu, R.K. dan Sinaga, Bonar M. 2006. *Aplikasi Model Ekonometrika*. IPB. Bogor.